

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2022**

BPTP Aceh
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPTP Aceh adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPTP Aceh mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPTP Aceh. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Banda Aceh, 31 Desember 2022
Kepala Balai,



Ir. M. Ferizal, M. Sc
NIP. 19650291992031002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud

C.4.2. Aset Lain-lain

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPTP Aceh yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banda Aceh, 31 Desember 2022
Kepala Balai,



Ir. M. Ferizal, M. Sc
NIP. 19650291992031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPTP Aceh Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 241.212.574,00 atau mencapai 176,71% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 136.500.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp.8.416.799.170,00 atau mencapai 97,89% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8.599.474.000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 169.951.758.532,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 99.396.300,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.169.715.309.138,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 137.053.094,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 14.570.615,00 dan Rp. 169.937.187.917,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 133.776.530,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 9.902.746.792,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp. -9.768.970.262,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Defisit Rp. -9.671.899.218,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. -9.671.899.218,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp. 171.433.386.319,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. -9.671.899.218,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp.

114.220,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 8.175.586.596,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp. 169.937.187.917,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPTP ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

Uraian	Catatan	31 Desember 2022			31 Desember 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	136.500.000,00	241.212.574,00	177,00	61.027.580,00
Jumlah Pendapatan		136.500.000,00	241.212.574,00	177,00	61.027.580,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	5.719.501.000,00	5.583.876.913,00	98,00	5.990.374.512,00
Belanja Barang	B.4.	2.729.973.000,00	2.683.042.257,00	98,00	9.554.531.381,00
Belanja Modal	B.5.	150.000.000,00	149.880.000,00	100,00	30.780.000,00
Jumlah Belanja		8.599.474.000,00	8.416.799.170,00	98,00	15.575.685.893,00

II. NERACA

BPTP ACEH
NERACA
PER 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	99.396.300,00	164.436.307,00
Jumlah Aset Lancar		99.396.300,00	164.436.307,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	148.263.738.880,00	148.263.738.880,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	12.127.776.732,00	11.977.896.732,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	24.052.918.437,00	24.052.918.437,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	288.381.000,00	288.381.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	60.750.000,00	60.750.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	222.000.000,00	222.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	(15.300.255.911,00)	(13.712.834.419,00)
Jumlah Aset Tetap		169.715.309.138,00	171.152.850.630,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	11.673.573,00	11.673.573,00
Aset Lain-lain	C.4.2.	1.137.995.000,00	1.137.995.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	(1.012.615.479,00)	(1.008.002.115,00)
Jumlah Aset Lainnya		137.053.094,00	141.666.458,00
Jumlah Aset		169.951.758.532,00	171.458.953.395,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	14.570.615,00	25.567.076,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		14.570.615,00	25.567.076,00
Jumlah Kewajiban		14.570.615,00	25.567.076,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	169.937.187.917,00	171.433.386.319,00
Jumlah Ekuitas		169.937.187.917,00	171.433.386.319,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		169.951.758.532,00	171.458.953.395,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BPTP ACEH LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	133.776.530,00	61.027.580,00
JUMLAH PENDAPATAN		133.776.530,00	61.027.580,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	5.583.876.913,00	5.958.875.512,00
Beban Persediaan	D.3.	509.840.307,00	1.418.462.900,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	1.353.715.285,00	3.570.035.497,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	507.145.450,00	553.449.000,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	356.133.981,00	1.638.079.517,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	0,00	2.396.706.500,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	1.592.034.856,00	1.612.183.778,00
JUMLAH BEBAN		9.902.746.792,00	17.147.792.704,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(9.768.970.262,00)	(17.086.765.124,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		2.750.979,00	-48.020.000,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		107.250.979,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	104.500.000,00	48.020.000,00
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		94.320.065,00	98.750.000,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	98.910.065,00	98.750.000,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	4.590.000,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		97.071.044,00	50.730.000,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		(9.671.899.218,00)	(17.036.035.124,00)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BPTP ACEH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
EKUITAS AWAL	E.1.	171.433.386.319,00	172.955.086.144,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(9.671.899.218,00)	(17.036.035.124,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3.	114.220,00	(323.014,00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	8.175.586.596,00	15.514.658.313,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	(1.496.198.402,00)	(1.521.699.825,00)
EKUITAS AKHIR	E.6.	169.937.187.917,00	171.433.386.319,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPTP Aceh

Balai Pengkajian Teknologi Petanian (BPTP) Aceh didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan sebagai asset pelayanan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Pertanian di Propinsi Aceh. Tugas pokok BPTP Aceh melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BPTP Aceh menyelenggarakan Tupoksi :

Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;

Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPTP Aceh. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPTP Aceh menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPTP Aceh dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPTP Aceh yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPTP Aceh adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPTP Aceh telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	117.900.000,00	117.900.000,00
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	18.600.000,00	18.600.000,00
Jumlah Pendapatan	136.500.000,00	136.500.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.334.400.000,00	5.719.501.000,00
Belanja Barang Operasional	678.510.000,00	708.710.000,00
Belanja Barang Non Operasional	1.962.732.000,00	460.927.000,00
Belanja Barang Persediaan	969.410.000,00	456.946.000,00
Belanja Jasa	348.852.000,00	239.372.000,00
Belanja Pemeliharaan	509.038.000,00	506.518.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.257.000.000,00	357.500.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	1.348.800.000,00	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	451.200.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	150.000.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	0,00
Jumlah Belanja	14.109.942.000,00	8.599.474.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 241.212.574,00 atau mencapai 177,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 136.500.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	18.600.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	117.900.000,00	241.027.509,00	204,43
Pendapatan Lain-Lain	0,00	185.065	0,00
Jumlah	136.500.000,00	241.212.574,00	176,71

Realisasi Pendapatan TA 2022 mengalami penurunan sebesar -32,72% dibandingkan TA 2022. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPTP Aceh adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0,00	1.957.000,00	-100,00
Pendapatan Lain-Lain	185.065,00	0,00	100,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	241.027.509,00	59.070.580,00	308,03
Jumlah	241.212.574,00	61.027.580,00	295,25

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp.8.417.724.432,00 atau 98,00% dari anggaran belanja sebesar Rp. 8.599.474.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	5.719.501.000,00	5.583.876.913,00	97,64
Belanja Barang	2.729.973.000,00	2.683.042.257,00	99,7
Belanja Modal	150.000.000,00	149.880.000,00	99,92

Uraian	2022			
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Total Belanja Kotor		8.599.474.000,00	8.417.724.432,00	98,00
Pengembalian Belanja		0,00	925.262,00	-100,00
Total Belanja		8.599.474.000,00	8.416.799.170,00	98,00

Dibandingkan dengan Tahun 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar 45,96% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya 4 Orang pegawai yang pensiun di Tahun 2022
2. Adanya Pemblokiran Pagu Anggaran Tahun 2022

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	.%
Belanja Pegawai	5.584.802.175,00	5.992.364.620,00	-6,80
Belanja Barang	2.683.042.257,00	9.554.531.381,00	-71,92
Belanja Modal	149.880.000,00	30.780.000,00	3,87
Total Belanja	8.417.724.432,00	15.577.676.001,00	-45,96

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.5.584.802.175,00 dan Rp.5.992.364.620,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar -6,79% dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Ada 4 Orang pegawai yang pensiun di Tahun 2022

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.584.802.175,00	5.992.364.620,00	-6,80
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Jumlah Belanja Kotor	5.584.802.175,00	5.992.364.620,00	-6,80
Pengembalian Belanja Pegawai	925.262,00	-1.990.108,00	-53,50
Jumlah Belanja	5.583.876.913,00	5.990.374.512,00	-6,79

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.683.042.257,00 dan Rp. 9.554.531.381,00. Realisasi belanja barang TA 2022 mengalami penurunan sebesar -71,92% dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pemblokiran pagu anggaran 2022

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	706.565.000,00	572.460.000,00	23,43
Belanja Barang Non Operasional	459.340.500,00	2.697.385.301,00	-82,97
Belanja Barang Persediaan	455.811.300,00	1.418.969.150,00	-67,88
Belanja Jasa	198.692.026,00	286.806.913,00	-30,72
Belanja Pemeliharaan	506.499.450,00	544.124.000,00	-6,91
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	356.133.981,00	1.638.079.517,00	-78,23
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	1.716.716.500,00	-100,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	679.990.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	2.683.042.257,00	9.554.531.381,00	-71,92
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	2.683.042.257,00	9.554.531.381,00	-71,92

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 149.880.000,00 dan Rp. 30.780.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar -38,69% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya belanja peralatan dan mesin berupa komputer, AC, Printer, Kursi Zeis, Sice dan kamera sejumlah 19 unit

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.880.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	30.780.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	149.880.000,00	30.780.000,00	38,69
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	149.880.000,00	30.780.000,00	38,69

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 30.780.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 mengalami penurunan sebesar -100% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Adanya Pengurangan Anggaran Belanja Modal dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	30.780.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	30.780.000,00	-100,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	30.780.000,00	-100,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp99.396.300,00 dan Rp164.436.307,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Barang Konsumsi	41.136.300,00	86.832.580,00
Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	646.000,00
Bahan Baku	58.260.000,00	76.957.727,00
Jumlah	99.396.300,00	164.436.307,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPTP Aceh per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp148.263.738.880,00 dan Rp148.263.738.880,00. Adapun terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Tanah Persil, sebagai berikut:

1. Koreksi Pencatatan Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II seluas 19.550 m² pada tanah yang berlokasi di Aceh Timur dan Bener Meriah;
2. Koreksi Nilai Kurang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II sebesar Rp.1.764.243.000 pada tanah yang berlokasi di Aceh Timur dan Bener Meriah
3. Koreksi Pencatatan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 1.448.306 m² pada tanah yang berlokasi di Aceh Timur dan Bener Meriah;
4. Koreksi Nilai Tambah Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sebesar Rp.125.752.522.880 pada tanah yang berlokasi di Aceh Timur dan Bener Meriah

Terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Tanah Non Persil, sebagai berikut:

1. Koreksi Pencatatan Tanah Kebun Percobaan seluas 1.436.306 m² pada tanah yang berlokasi di Aceh Timur dan Bener Meriah;
2. Koreksi Nilai Tambah Tanah Kebun Percobaan sebesar Rp.123.988.279.880 pada tanah yang berlokasi di Aceh Timur dan Bener Meriah.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPTP Aceh per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp12.127.776.732,00 dan Rp11.977.896.732,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	11.977.896.732,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai Aset	149.880.000,00
Saldo per 31 Desember 2022	12.127.776.732,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-10.440.243.222,00
Nilai Buku per 31 Desember 2022	1.687.533.510,00

Terdapat mutasi penambahan atas nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp.149.880.000 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), berasal dari:.

1. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Kegiatan Layanan Sarana Internal sebesar Rp.49.880.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
3. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran berupa 4 unit AC split sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).
4. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Kegiatan Layanan Sarana Internal berupa Kursi Zeis 1 Paket sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
5. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran berupa 1 unit Camera Webcam sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).
6. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Kegiatan Layanan Sarana Internal berupa Kursi Sofa Ziva Set Informa 1 Paket sebesar Rp.24.880.000 (Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
7. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran berupa 4 unit Lap Top sebesar Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah).

8. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran berupa 3 unit P.C Unit sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
9. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran berupa 4 unit Printer sebesar Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah).
10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran berupa 1 unit Air Conditioning (AC) sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPTP Aceh per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp24.052.918.437,00 dan Rp24.052.918.437,00.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPTP Aceh per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp288.381.000,00 dan Rp288.381.000,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPTP Aceh per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp60.750.000,00 dan Rp60.750.000,00.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki BPTP Aceh per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp222.000.000,00 dan Rp222.000.000,00. yang dirincikan sebagai berikut:

1. Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan senilai Rp37.000.000 tahun peroleh 2016. Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Gedung dan Bangunan untuk Toko Tani, Pekerjaan tidak dilanjutkan karena anggaran untuk pembangunan fisik tidak tersedia.
2. Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan senilai Rp45.000.000 tahun peroleh 2016. Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Gedung dan Bangunan untuk Gudang UPBS. Pekerjaan Tidak dilanjutkan karena anggaran untuk pembangunan fisik tidak tersedia
3. Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan senilai Rp13.800.000 tahun peroleh 2020. Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Gedung dan Bangunan untuk Saung Tani yang berlokasi di Kebun Percobaan Gayo Bener Meriah.

4. Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan senilai Rp93.550.000 tahun peroleh 2020. Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar Kebun yang berlokasi di Kebun Percobaan Gayo Bener Meriah
5. Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan senilai Rp21.000.000 tahun peroleh 2020. Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Rumah Negara yang berlokasi di Kebun Percobaan Gayo Bener Meriah
6. Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan senilai Rp11.650.000 tahun peroleh 2020. Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Gedung Aula yang berlokasi di BPTP Aceh

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPTP Aceh per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.-15.300.255.911,00 dan Rp. -13.712.834.419,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	12.127.776.732,00	-10.440.243.222,00	1.687.533.510,00
2.	Gedung dan Bangunan	24.052.918.437,00	-4.794.583.003,00	19.258.335.434,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	288.381.000,00	-65.429.686,00	222.951.314,00
4.	Aset Tetap Lainnya	60.750.000,00	0,00	60.750.000,00
Akumulasi Penyusutan		36.529.826.169,00	-15.300.255.911,00	21.229.570.258,00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp11.673.573,00 dan Rp11.673.573,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	11.673.573,00
Jumlah	11.673.573,00

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BPTP Aceh per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.137.995.000,00 dan Rp1.137.995.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPTP Aceh serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPTP Aceh per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp-1.012.615.479,00 dan Rp-1.008.002.115,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	11.673.573,00	-11.673.573,00	0,00
2.	Aset Lain-lain	1.137.995.000,00	-1.000.941.906,00	137.053.094,00
	Akumulasi Penyusutan	1.149.668.573,00	-1.012.615.479,00	137.053.094,00

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp14.570.615,00 dan Rp13.383.283,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada BPTP Aceh per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0,00	0,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	14.570.615,00	13.383.283,00
Jumlah	14.570.615,00	13.383.283,00

Utang kepada pihak ketiga sejumlah Rp. 14.570.615,00 terdiri dari ; tagihan langganan listrik, air dan telepon

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp169.937.187.917,00 dan Rp171.433.386.319,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp241.212.574,00 dan Rp61.027.580,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0,00	1.957.000,00	-100,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	114.175.000,00	40.100.000,00	184,73
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	107.250.979,00	0,00	100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	19.601.530,00	18.970.580,00	3,33
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	185.065,00	0,00	100,00
Jumlah	241.212.574,00	61.027.580,00	2,95

1. Terjadi peningkatan hasil kebun dan penjualan Benih Sumber
2. Terjadi Peningkatan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin dikarenakan adanya pelelangan BMN berupa Kendaraan Roda 4 dan Roda 2.
3. Pendapatan sewa gedung dan bangunan terjadi kenaikan dikarenakan Rumah Negara yang dahulu tidak ada penghuni sudah diisi kembali oleh pegawai.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.583.876.913,00 dan Rp5.958.875.512,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.712.867.940,00	4.017.384.060,00	-7,58
Beban Pembulatan Gaji PNS	50.741,00	57.382,00	-11,57
Beban Tunj. Anak PNS	91.401.554,00	98.439.814,00	-7,15
Beban Tunj. Beras PNS	222.836.340,00	240.651.660,00	-7,40
Beban Tunj. Fungsional PNS	507.330.000,00	513.950.000,00	-1,29
Beban Tunj. PPh PNS	19.007.938,00	19.503.206,00	-2,54
Beban Tunj. Struktural PNS	23.040.000,00	25.200.000,00	-8,57
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	276.786.400,00	300.102.390,00	-7,77
Beban Tunjangan Umum PNS	110.325.000,00	123.265.000,00	-10,50
Beban Uang Lembur	0,00	0,00	0,00
Beban Uang Makan PNS	620.231.000,00	620.322.000,00	0,00
Jumlah	5.583.876.913,00	5.958.875.512,00	-6,29

Beban pegawai mengalami penurunan -6,29% dikarenakan ada 6 orang pegawai pensiun sepanjang tahun 2022.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp509.840.307,00 dan Rp1.418.462.900,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	8.532.727,00	159.759.050,00	-94,66
Beban Persediaan konsumsi	501.307.580,00	1.255.298.850,00	-60,06
Beban persediaan lainnya	0,00	3.405.000,00	-100,00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Jumlah	509.840.307,00	1.418.462.900,00	-64,06

Beban persediaan turun 64,06% dibandingkan tahun 2021 dikarenakan adanya pemblokiran dana anggaran TA. 2022

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.353.715.285,00 dan Rp3.557.851.704,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Bahan	220.210.500,00	477.145.100,00	-53,85
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	1.658.500.201,00	-100,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	239.130.000,00	561.740.000,00	-57,43
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	135.960.000,00	135.960.000,00	0,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	799.000,00	102.975.000,00	-99,22
Beban Jasa Profesi	1.000.000,00	10.000.000,00	-90,00
Beban Keperluan Perkantoran	494.205.000,00	436.500.000,00	13,22
Beban Langganan Air	389.175,00	8.383.830,00	-95,36
Beban Langganan Listrik	144.288.975,00	124.982.748,00	15,45
Beban Langganan Telepon	29.332.635,00	31.664.825,00	-7,37
Beban Sewa	12.000.000,00	10.000.000,00	20,00
Jumlah	1.353.715.285,00	3.557.851.704,00	-61,95

Realisasi beban barang dan jasa turun 61,95% dikarenakan pemblokiran dana anggaran TA. 2022

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp507.145.450,00 dan Rp553.449.000,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	132.340.000,00	171.139.000,00	-22,67
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	139.987.000,00	144.992.000,00	-3,45
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	234.172.450,00	227.993.000,00	2,71
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	646.000,00	8.650.000,00	-92,53
Beban Persediaan suku cadang	0	675.000,00	-100,00
Jumlah	507.145.450,00	553.449.000,00	-8,36

Beban pemeliharaan mengalami penurunan oleh beban pemeliharaan gedung dan bangunan di gues house, kebun KP Gayo dan KP Paya Gajah.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp356.133.981,00 dan Rp1.638.079.517,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	356.133.981,00	641.363.780,00	-44,47
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	996.715.737,00	-100,00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00
Jumlah	356.133.981,00	1.638.079.517,00	-144,47

Penurunan beban perjalanan terjadi karena adanya pemblokiran anggaran TA. 2022

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.396.706.500,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	103.600.000,00	-100
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	0,00	376.400.000,00	-100
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00	1.916.706.500,00	-100
Jumlah	0,00	2.396.706.500,00	-100

Penurunan beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat terjadi karena adanya pemblokiran anggaran TA. 2022

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.592.034.856,00 dan Rp1.612.183.778,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan

dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	953.835.091,00	953.231.563,00	0,06
Beban Penyusutan Irigasi	8.605.944,00	8.605.944,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	4.613.364,00	4.613.364,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	623.920.457,00	644.834.414,00	-3,24
Jumlah	1.592.034.856,00	1.612.345.285,00	-3,18

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	104.500.000,00	48.020.000,00	117,62
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4.590.000	0,00	100,00
Pendapatan Pelepasan Aset	107.250.979,00	0,00	100,00

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	98.910.065,00	98.750.000,00	0,16
Jumlah	97.071.044,00	50.730.000,00	91,35

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp171.433.386.319,00 dan Rp172.955.086.144,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp-9671.899.218,00 dan Rp-17.036.035.124,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp114.220,00 dan Rp-323.014,00.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8.175.586.596,00 dan Rp15.514.658.313,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2022
Ditagihkan ke Entitas Lain	8.416.799.170,00
Diterima dari Entitas Lain	-241.212.574,00
Jumlah	8.175.586.596,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2022 saldo DDEL adalah sebesar Rp-241.212.574,00 sedangkan DKEL sebesar Rp8.416.799.170,00.

E.4.2. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp169.937.187.917,00 dan Rp171.433.386.319,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Masih adanya hutang pada pihak ketiga berupa:

1. beban langganan listrik, air dan telepon.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Uang makan bulan Desember 2021 untuk 46 pegawai dengan nilai Rp. 31.499.000,00 yang masih belum dibayar dikarenakan GU Nihil dan dibayarkan di bulan Januari 2022.